

PENGARUH RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS DI PROVINSI JAWA TIMUR*

Novila Fatmawati¹, Andriana², Oktaviani Ari Wardhaningrum^{3*}

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Universitas Jember, Jember

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of financial ratios ability to predict financial distress in East Java. Financial distress in this study is defined as the inability of local governments to provide public services based on established service standards. This study used secondary data consisting of Laporan Realisasi APBD and Neraca of districts and cities in East Java Province in 2017-2020 and population data obtained from DJPK Kemenkeu and BPS. The method that used in this study is binary logistic regression. Based on the purposive sampling method, the number of samples is 38 observational data. The dependent variable in this study is financial distress and the independent variables are financial independence, the degree of decentralization, solvency, financial performance, financial position, efficiency, and complexities of government. The results showed that the prediction of financial distress in districts and cities in East Java is influenced by only the complexity of government. Meanwhile, the other variables do not affect financial distress prediction.

Keywords: *Complexities of Government, Efficiency, Financial Distress, Financial Independence, Financial Performance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi *financial distress* di Jawa Timur. *Financial distress* dalam penelitian ini diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan standar layanan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD dan Neraca Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2017-2020 dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu dan BPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel yang dihasilkan sebanyak 38 data observasi. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *financial distress* dan variabel independennya yaitu kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, solvabilitas, kinerja keuangan, posisi keuangan, efisiensi, dan kompleksitas pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prediksi *financial distress* pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur hanya dipengaruhi oleh kompleksitas pemerintah. Sedangkan untuk variabel yang lain tidak memengaruhi prediksi *financial distress*.

Kata kunci: Efisiensi, *Financial Distress*, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan, Kompleksitas Pemerintah

PENDAHULUAN

Tujuan adanya otonomi adalah pemberian kebebasan kepada pemerintah daerah agar lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya daerah serta dapat mencapai tujuan dan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di daerahnya. Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu terkait pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola dan mengatur pendapatan daerahnya guna melaksanakan pengeluaran pemerintah, pembangunan, dan pemberian layanan publik. Berdasarkan uraian tersebut, agar pelaksanaan otonomi dapat berjalan dengan lancar maka sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat yang dapat dilihat dari tingkat ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masih tinggi. Berdasarkan rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1% sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah masih pasif dalam mengelola PAD dan menunjukkan bahwa semakin besar tingkat ketergantungan fiskal pada pemerintah daerah kota dan kabupaten (Menteri Keuangan Sri Mulyani, 2019 dalam Nugraha, 2019).

Syurmita (2014) mengemukakan bahwa status *financial distress* atau kesulitan keuangan dapat dilihat dari nilai dari rasio belanja modal terhadap total belanja yang berada di bawah 30%. Apabila dilihat dari realisasi belanja daerah bisa dikatakan masih memiliki kualitas yang belum baik karena belanja modal dalam skala nasional masih berada di bawah 30% yaitu sebesar 21,1%. Jawa Timur sendiri berdasarkan ringkasan APBD TA 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukkan bahwa tahun 2017 dan 2018 provinsi Jawa Timur masih memiliki porsi belanja modal yang rendah yaitu sebesar 9,3% (Kementerian Keuangan, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur masih belum efisien dan efektif dalam memaksimalkan belanja daerah khususnya belanja modal yang mempunyai peran yang cukup penting dalam pemberian pelayanan publik. Apabila pemerintah daerah tidak dapat memperbaiki kualitas belanja dalam APBD dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah dan pemberian fasilitas publik. Selain itu juga dikhawatirkan akan menyebabkan pemerintah daerah mengalami kondisi kesulitan keuangan atau yang bisa disebut dengan *financial distress*.

Jones & Walker (2007) mengartikan *financial distress* sebagai suatu kondisi yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu dalam memberikan layanan publik yang layak berdasarkan standar kualitas layanan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah yang tidak memiliki kemampuan ini disebabkan karena dana yang dimiliki tidak cukup untuk menyediakan infrastruktur pelayanan publik. *Financial distress* sering dikaitkan dengan utang, karena utang adalah hal yang penting dalam

pendanaan pemerintah dan pemberian pelayanan publik. Terkait dengan kesulitan keuangan, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah untuk dapat mengatasi kesulitan tersebut. Namun, dalam melakukan pinjaman pemerintah harus memiliki nilai rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit yaitu 2,5. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 56/2018 tentang Pinjaman Daerah. Oleh karena itu, apabila pemerintah daerah memiliki DSCR kurang dari yang telah ditetapkan tidak diizinkan untuk melakukan pinjaman karena dikhawatirkan tidak dapat membayar pokok pinjaman maupun bunga pinjaman. Kesulitan pemerintah dalam mengembalikan pinjaman dapat dikatakan dalam status *financial distress* dan jumlah utang yang tinggi merupakan salah satu indikator *financial distress* (Almilia, 2006).

Guna mengetahui tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya maka *financial distress* diprososikan dengan DSCR. Suatu pemerintah daerah harus melakukan *monitoring* terhadap kesehatan keuangan secara periodik agar dapat membentuk suatu *early warning system* yang dapat memprediksi segala kemungkinan di masa depan baik dari sisi ekonomi makro maupun sosial politik (Maizunati, 2017). Penelitian ini merujuk pada penelitian Atmaja (2012) dan Husniati *et al.* (2016). Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu kota dan kabupaten di Jawa Timur, penelitian ini menggunakan periode 2017-2020, rasio yang digunakan pada penelitian ini yaitu derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efisiensi, solvabilitas, posisi keuangan, kompleksitas pemerintah, dan kinerja keuangan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Financial distress umumnya sering dikenal di sektor swasta, namun setelah beberapa waktu mulai terdapat beberapa peneliti ygng meneliti mengenai *financial distress* pada sektor publik. Jones & Walker (2007) mengartikan *financial distress* sebagai suatu kondisi yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu dalam memberikan layanan publik yang layak berdasarkan standar kualitas layanan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah yang tidak memiliki kemampuan ini disebabkan karena dana yang dimiliki tidak cukup untuk menyediakan infrastruktur pelayanan publik. Dampak yang diakibatkan dari *financial distress* ini yaitu menurunnya kesejahteraan rakyat karena dana lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai bukan belanja modal.

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah

Definisi keuangan daerah tertuang dalam PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 1, yaitu seluruh kewajiban dan hak daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang dan seluruh bentuk kekayaan yang dapat menjadi milik daerah yang berhubungan dengan kewajiban dan hak daerah tersebut. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) digunakan untuk melihat kinerja

keuangan daerah dan mengetahui kondisi keuangan suatu daerah. Pengertian IPKD berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020 pasal 6 yaitu satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam waktu tertentu.

Otonomi Daerah

Menurut Simanjuntak (2013) otonomi daerah merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa mengelola daerah dengan baik dan mengurangi kesenjangan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan sesuai undang-undang yang berlaku. Otonomi daerah memiliki pengertian bahwa pemerintah pusat memberikan hak otonom kepada daerah agar mampu mengelola sumber daya dan ekonomi daerahnya, selain itu dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengaktualisasi seluruh potensi daerah secara optimal (Safitri, 2016).

Financial Distress

Financial distress yaitu suatu kondisi pemerintah daerah yang tidak mampu dalam memberikan layanan publik yang layak sesuai standar layanan yang ditetapkan. Pemerintah daerah yang tidak memiliki kemampuan ini disebabkan karena dana yang dimiliki tidak cukup untuk menyediakan infrastruktur pelayanan publik, seperti jembatan, jalan dan fasilitas publik yang lain (Jones & Walker, 2007). Sutaryo *et al* (2010) mengartikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam membayar pokok pinjaman maupun bunga pinjaman.

Kemandirian Keuangan

Islamiyah (2021) mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan daerah diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber utama keuangan daerah secara efektif dan efisien. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila mampu mengurus keuangan daerah sendiri tanpa tergantung kepada pemerintah pusat. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila mampu mengurus keuangan daerah sendiri tanpa tergantung kepada pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat maupun provinsi, begitupun sebaliknya. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi dapat meningkatkan kemandirian dalam hal sumber daya keuangan daerah sehingga daerah memiliki kekuatan sendiri untuk bertahan serta tergindar dari kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2018) dan Sartika (2016) membuktikan bahwa nilai dari rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan uraian, maka dapat disusun hipotesis yaitu:

H₁: Rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress*.

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi memiliki arti penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk memacu kreatifitas daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi dijadikan tanda dari bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam sistem sentralistik untuk melakukan suatu tindakan dalam mengatasi masalah pemerintah daerah tidak sepenuhnya bebas namun masih dibawah pengawasan presiden, dalam sistem otonomi pemerintah daerah dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam mengambil keputusan dan menemukan cara yang sesuai untuk setiap masalah yang dialami (Syahputra, 2017). Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat derajat desentralisasi.

Derajat desentralisasi memberikan gambaran mengenai pemerintah daerah yang mempunyai PAD tinggi dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan baik karena lebih banyak mengandalkan PAD dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat diukur menggunakan derajat desentralisasi. Penelitian ini didukung oleh penelitian Husniati *et al.* (2016) dan Sartika (2016) yang membuktikan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap prediksi *financial distress* karena rendahnya campur tangan pemerintah pusat menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka bisa disusun hipotesis yaitu:

H₂: Derajat desentralisasi berpengaruh terhadap *financial distress*.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan entitas untuk membayar utang jika entitas tersebut dilikuidasi, apabila entitas mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya maka dapat dikatakan dalam kondisi *solvable*, demikian pula sebaliknya apabila entitas tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya maka dapat disebut dalam kondisi *insolvable* (Dewi & Utama, 2022). Solvabilitas dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (Mahmudi, 2019).

Apabila pemerintah daerah tidak mampu melunasi kewajibannya, artinya pemerintah daerah tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup sehingga kemungkinan untuk mengalami *financial distress* besar. Penelitian Sartika (2016) mengungkapkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap prediksi *financial distress*. Penelitian Sartika (2016) mengungkapkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap prediksi *financial distress*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat disusun hipotesis yaitu:

H₃: Rasio solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Sari (2020) yaitu hasil kerja atau perbandingan kualitas dan kuantitas yang bersifat fisik atau mental, fisik atau non mental, gambaran kondisi keuangan perusahaan yang menyangkut pengumpulan dan alokasi dana, yang diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan perusahaan.

Pemerintah daerah yang memiliki surplus (defisit) yang tinggi memiliki kemungkinan untuk mengalami kondisi *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2012) mengungkapkan bahwa secara simultan rasio kinerja keuangan mempengaruhi kemungkinan *financial distress*. Hipotesis yang dapat disusun berdasarkan uraian yaitu sebagai berikut.

H₄: Rasio kinerja keuangan berpengaruh terhadap *financial distress*.

Posisi Keuangan

Menurut Sutaryo *et al.* (2010), PosGW membandingkan antara total aset atas total pendapatan. Semakin tinggi rasio ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki cukup aset untuk memberikan layanan publik yang menggunakan dana dari pendapatan. Pemerintah daerah yang memiliki rasio posisi keuangan yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu membiayai dan menyediakan pelayan publik sehingga kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin besar, begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pengertian *financial distress* menurut Jones & Walker (2007), yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang layak sesuai standar kualitas layanan yang ditetapkan. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H₅: Rasio posisi keuangan berpengaruh terhadap *financial distress*.

Efisiensi

Menurut Sutaryo *et al.* (2010), LCO menggambarkan perbandingan antara besarnya pengeluaran modal terhadap PAD. Semakin rendah rasio menunjukkan bahwa semakin bagus kinerja suatu pemerintah daerah dan semakin besar rasio mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah pengeluaran modal yang besar.

Pemerintah daerah yang mempunyai rasio efisiensi yang tinggi mengindikasikan bahwa jumlah pengeluaran besar, sehingga pemerintah daerah berada pada kondisi yang tidak efisien dan kemungkinan terjadinya *financial distress* juga tinggi karena tidak diiringi dengan peningkatan PAD. Berdasarkan uraian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₆ : Rasio efisiensi berpengaruh terhadap *financial distress*

Kompleksitas Pemerintah

Variabel kompleksitas pemerintah (digambarkan dengan jumlah penduduk) mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan (Ingram, 1984). Hal ini juga ditunjukkan dengan UU No 1/2022 Pasal 126 yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang banyak mencerminkan bahwa semakin besar kebutuhan untuk memberikan layanan publik pada masing-masing daerah. Jumlah penduduk yang besar menunjukkan bahwa semakin besar tuntutan kepada pemerintah daerah akan pengungkapan informasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian dari Syurmita (2014) menunjukkan bahwa populasi penduduk secara signifikan memengaruhi *financial distress* pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Oleh karena itu, semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki oleh kabupaten dan kota, maka kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin kecil, begitupun sebaliknya. Hipotesis yang dapat disusun berdasarkan uraian di atas, yaitu:

H₇: Rasio kompleksitas berpengaruh terhadap *financial distress*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi APBD dan Neraca Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2017-2020 dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistika (BPS). Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017-2020.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menyampaikan laporan realisasi APBD kepada DJPK Kementerian Keuangan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menyampaikan laporan neraca kepada DJPK Kementerian Keuangan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu terdiri variabel dependen dan variabel dependen.

- a) Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *financial distress*.

Berikut merupakan formula yang digunakan untuk menghitung rasio DSCR berdasarkan Mahmudi (2019):

$$DSCR = \frac{(PAD + (DBH - DBHDR) + DAU) - Belanja Wajib}{Angsuran Pokok + Bunga + Biaya Lain}$$

b) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ada tujuh yaitu:

[1] Kemandirian Keuangan

Formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini menurut Mahmudi (2019), yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi}}$$

[2] Derajat Desentralisasi

Formula yang digunakan pada rasio ini menurut Mahmudi (2019), sebagai berikut:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}}$$

[3] Solvabilitas

Menurut Mahmudi (2019), formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

[4] Kinerja Keuangan

Menurut Sutaryo *et al* (2010), formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini yaitu:

$$\text{PerGW} = \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja}}{\text{Total Pendapatan}}$$

[5] Posisi Keuangan

Menurut Sutaryo *et al* (2010), formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini yaitu:

$$\text{PosGW} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Pendapatan}}$$

[6] Efisiensi

Menurut Sutaryo *et al* (2010), formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini yaitu:

$$\text{LCO} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Modal}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}$$

[7] Kompleksitas Pemerintah

Menurut Pratiwi (2015), formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini yaitu:

$$P = \ln(\text{Jumlah Penduduk})$$

Model yang digunakan dalam penelitian adalah regresi logistik menggunakan perangkat lunak SPSS. Model persamaan yang digunakan yaitu:

$$\ln \frac{p}{(p-1)} = \beta_0 + \beta_1(KK) + \beta_2(Des) + \beta_3(Solv) + \beta_4(KKe) + \beta_5(PK) + \beta_6(Ef) + \beta_7(KP) + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan kondisi dari suatu kejadian yang diteliti kemudian dihitung menggunakan alat ukur dan diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil dari olah data tersebut akan diungkapkan untuk memberi gambaran dan penjelasan secara urut, jelas dan ringkas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Tabel 1 dan tabel 2 menyajikan nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-rata) dan standar deviasi dengan variabel yang digunakan yaitu kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, solvabilitas, kinerja keuangan, posisi keuangan, efisiensi, dan kompleksitas pemerintah. Berikut hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Kategori *Financial Distress*

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keuangan	16	0,115	0,384	0,189	0,065
Derajat Desentralisasi	16	0,098	0,269	0,150	0,042
Solvabilitas	16	0,000	0,040	0,013	0,012
Kinerja Keuangan	16	-0,026	0,135	0,033	0,052
Posisi Keuangan	16	1,071	2,921	1,695	0,472
Efisiensi	16	0,406	1,683	1,119	0,366
Kompleksitas Pemerintah	16	12,230	14,790	13,970	0,647
Y	16	0,000	0,000	0,000	0,000
Valid N (Listwise)	16				

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Kategori Non Financial Distress

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keuangan	136	0,090	1,829	0,270	0,271
Derajat Desentralisasi	136	0,080	0,643	0,186	0,098
Solvabilitas	136	0,000	0,060	0,007	0,008
Kinerja Keuangan	136	-7,712	0,876	-0,040	0,677
Posisi Keuangan	136	0,929	6,085	2,054	0,952
Efisiensi	136	0,022	8,622	1,126	0,801
Kompleksitas Pemerintah	136	11,750	14,880	13,572	0,798
Y	136	1,000	1,000	1,000	0,000
Valid N (Listwise)	136				

Analisis *Logistic Regression*

1. Uji Nilai *Likelihood*

Hasil pengujian menunjukkan nilai -2 log *likelihood* (*block 0*) sebelum adanya penambahan variabel independen yaitu 102,295 sedangkan setelah adanya penambahan variabel independen nilai -2 log *likelihood* (*block 1*) turun sebesar 12,598 yaitu menjadi 89,697. Hal ini berarti dengan menambah variabel independen ke dalam model penelitian dapat memperbaiki model fit dan secara keseluruhan model regresi logistik yang terbentuk mampu dalam menguji hipotesis.

Tabel 3. Uji Nilai Likelihood

	<i>Iteration</i>	<i>-2 Log likelihood</i>
Step 0	<i>Initial</i>	102,295
Step 1	<i>Model Summary</i>	89,697

2. Uji Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Berdasarkan hasil uji, nilai Hosmer and Lemeshow's *Goodness of Fit Test* sebesar 7,290 dan nilai signifikansi yang dihasilkan berada di atas 5% yang bermakna bahwa model dapat memprediksi nilai observasi dan model dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan.

Tabel 4. Uji Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

<i>Step</i>	<i>Chi-square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
1	7,290	8	0,506

3. Uji Nilai Nagelkerke R²

Berdasarkan nilai tersebut berarti variabel dependen yaitu *financial distress* dan *non financial distress* mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 16,2%, sedangkan selebihnya sebanyak 83,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Tabel 5. Uji Nilai Nagelkerke R²

<i>Step</i>	<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Cox & Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
1	89,697	0,080	0,162

4. Uji Nilai Percently Correctly Predicted

Hasil dari uji nilai *Percently Correctly Predicted* ditunjukkan oleh tabel yang termasuk ke dalam kategori *financial distress* sebanyak 16 dan yang termasuk ke dalam kondisi *non financial distress* sebesar 136, sedangkan nilai *overall percentage* yaitu 89,5% yang berarti bahwa ketepatan model dalam penelitian ini yaitu 89,5% dan dapat disimpulkan cukup baik.

Tabel 6. Uji Nilai Percently Correctly Predicted

<i>Observed</i>	<i>Predicted</i>			<i>Percentage Correct</i>	
	<i>Y</i>		<i>Financial Distress</i>		
	<i>Financial Distress</i>	100,00			
Step 1	Y	0	16	,0	
		100,00	136	100,0	
	<i>Overall Percentage</i>			89,5	

5. Uji Estimasi Parameter atau Koefisien Regresi

Tabel 7 di bawah ini memberikan gambaran bahwa variabel dengan nilai Sig. lebih tinggi daripada 5% yaitu kemandirian keuangan sebesar 0,481; derajat desentralisasi sebesar 0,760; solvabilitas sebesar 0,335; kinerja keuangan sebesar 0,446; posisi keuangan sebesar 0,548; dan efisiensi sebesar 0,501. Nilai

Sig. dari variabel tersebut berada di atas 5% oleh karena itu variabel tersebut dapat dikatakan tidak berpengaruh atau bukan variabel yang memengaruhi prediksi *financial distress*. Selain itu, variabel dengan nilai Sig. lebih kecil daripada 5% yaitu hanya variabel kompleksitas pemerintah yaitu 0,037. Hal ini dapat dikatakan variabel tersebut adalah variabel yang memiliki pengaruh terhadap prediksi *financial distress* di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 7. Uji Estimasi Parameter atau Koefisien Regresi

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
<i>Financial Independence</i>	,146	,207	,496	1	,481	1,157
<i>Degree of Decentralization</i>	-,101	,332	,093	1	,760	,904
<i>Solvency</i>	,000	,000	,928	1	,335	1,000
<i>Financial Performance</i>	-,027	,035	,581	1	,446	,974
<i>Financial Position</i>	-,004	,006	,360	1	,548	,996
<i>Efficiency</i>	,006	,010	,452	1	,501	1,006
<i>Government Complexity</i>	-,028	,014	4,352	1	,037	,972
<i>Constant</i>	17,332	8,591	4,070	1	,044	33661495,129

Berdasarkan tabel di atas, persamaan model regresi yang dapat dibentuk yaitu:

$$\ln \frac{p}{(p-1)} = \beta_0 + \beta_1(KK) + \beta_2(Des) + \beta_3(Solv) + \beta_4(KKe) + \beta_5(PK) + \beta_6(Ef) + \beta_7(KP) + e$$

PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan dan *Financial Distress*

Berdasarkan uji yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi dari variabel kemandirian keuangan yaitu 0,481 lebih besar dari 5% (0,05) yang memiliki makna bahwa kemandirian keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Data yang diolah menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2020, kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur mayoritas berada pada tingkat kemandirian <0,25 (belum mandiri) dan 0,25 - 0,50 (menuju mandiri). Hal tersebut karena sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur masih memiliki PAD yang lebih rendah daripada dana transfer. Kemandirian keuangan bukan faktor yang menentukan kondisi *financial distress* di Jawa Timur karena tingkat kemandirian yang rendah tidak menjamin suatu pemerintah daerah akan mengalami *financial distress* kemungkinan penyebabnya karena sumber pembiayaan yang beragam antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang mengalami kesulitan melaksanakan otonomi karena kepemilikan sumber daya daerah terbatas sehingga pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang memadai melalui dana ekternal seperti transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Derajat Desentralisasi dan *Financial Distress*

Hipotesis yang kedua yaitu derajat desentralisasi memiliki pengaruh terhadap *financial distress* ditolak sebab secara statistik menunjukkan hasil bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh pada *financial distress*. Pengujian pada penelitian memberikan hasil nilai signifikansi variabel derajat desentralisasi sebesar 0,760 lebih besar dari 5% (0,05) yang berarti bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh pada *financial distress*. Penelitian yang dilakukan di Jawa Timur pada tahun 2017-2020 memberikan hasil bahwa derajat desentralisasi bukan merupakan faktor yang mempengaruhi *financial distress*, kemungkinan penyebabnya karena sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki PAD yang lebih kecil dan masih banyak mengandalkan dana transfer (nilai derajat desentralisasi rendah). Pemerintah daerah dengan nilai derajat desentralisasi rendah yang artinya lebih besar dalam mengandalkan dana transfer kemungkinan untuk mengalami *financial distress* rendah, begitupun sebaliknya pemerintah dengan nilai derajat desentralisasi tinggi artinya lebih sedikit dalam mengandalkan dana transfer kemungkinan untuk mengalami *financial distress* tinggi.

Solvabilitas dan *Financial Distress*

Hipotesis yang ketiga yaitu solvabilitas memiliki pengaruh pada *financial distress* ditolak. Secara statistik menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress* yang dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel solvabilitas yaitu 0,335 lebih besar dari 5% (0,05). Hasil olah data pada tahun 2017-2020 di wilayah Jawa Timur memperlihatkan bahwa solvabilitas bukan merupakan faktor yang menentukan kondisi *financial distress*. Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki nilai solvabilitas yang terbilang cukup rendah karena total utang yang dimiliki lebih kecil daripada total asetnya, namun tidak berarti bahwa *financial distress* akan dialami oleh pemerintah daerah. Meskipun nilai solvabilitas rendah, pemerintah daerah di Jawa Timur masih mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki. Apabila aktivitas pelayanan publik yang membutuhkan aset tinggi dan tidak dapat menutupi utang, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan PAD dan bisa mengandalkan dana eksternal seperti transfer pemerintah provinsi maupun pusat.

Kinerja Keuangan dan *Financial Distress*

Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi variabel kinerja keuangan yaitu 0,446 lebih tinggi dari 5% (0,05) yang berarti bahwa rasio kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Hasil uji yang dilakukan pada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur pada tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa kinerja keuangan bukan merupakan faktor yang menentukan kondisi *financial distress* karena meskipun nilai rasio yang dihasilkan rendah tidak menjamin suatu daerah akan mengalami *financial distress*, begitupun sebaliknya meskipun nilai rasio yang dihasilkan tinggi tidak menjamin bahwa suatu daerah akan terbebas dari kondisi *financial distress*.

Posisi Keuangan dan Financial Distress

Hipotesis yang kelima ditolak, hasil uji menunjukkan nilai signifikansi variabel posisi keuangan yaitu 0,548 lebih tinggi dari 5% (0,05) yang berarti bahwa rasio posisi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Hasil olah data yang dilakukan di kabupaten dan kota se Jawa Timur pada tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa posisi keuangan cukup tinggi, namun variabel ini bukan faktor penentu kondisi *financial distress*. Hal ini kemungkinan karena aset pemerintah daerah yang juga didanai oleh utang. Selain itu, meskipun nilai posisi keuangan tinggi tidak menutup kemungkinan daerah tersebut mengalami *financial distress* karena nilai posisi keuangan tinggi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum tentu mampu menutup biaya untuk memberikan pelayanan publik dan melakukan pendanaan aset tanpa mengalami kesulitan keuangan. Alasan lain yaitu karena adanya kondisi di luar dugaan seperti pandemi *Covid-19* yang menyebabkan adanya realokasi dana, yang seharusnya dana dialokasikan untuk pendanaan aset akan tetapi di realokasi untuk kebutuhan lain seperti penyediaan APD, pembangunan tempat untuk karantina orang yang terpapar *Covid-19*, dan alat-alat kesehatan lain yang lebih penting.

Efisiensi dan *Financial Distress*

Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi dari variabel efisiensi sebesar 0,501 lebih tinggi daripada 5% (0,05) yang berarti rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil olah data yang dilakukan pada kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2020 menunjukkan nilai efisiensi cukup tinggi yang berarti bawah jumlah pengeluaran lebih tinggi daripada jumlah PAD. Hal tersebut menunjukkan bahwa efisiensi bukan faktor penentu kondisi *financial distress* karena nilai rasio yang tinggi tidak menjamin bahwa pemerintah daerah akan mengalami *financial distress*, begitupun sebaliknya meskipun pemerintah daerah inefisien mengelola PAD untuk pengeluaran modal, pemerintah daerah masih memiliki sumber pendapatan lain seperti dana transfer yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa menyelamatkan daerah dari kondisi *financial distress*.

Kompleksitas Pemerintah dan *Financial Distress*

Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis yang ketujuh diterima karena secara statistik menunjukkan hasil bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi variabel kompleksitas pemerintah sebesar 0,037 lebih rendah dari 5% (0,05). Hasil olah data yang dilakukan pada tahun 2017-2020 di kota dan kabupaten di Jawa Timur kompleksitas pemerintah merupakan faktor penentu kondisi *financial distress*. Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak kedua setelah Jawa Barat yaitu Jawa Timur, hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk maka pemerintah daerah memiliki tuntutan yang besar akan pemberian pelayanan publik. Semakin banyaknya tuntutan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah

daerah semakin efektif karena tuntutan masyarakat akan pelayanan publik memungkinkan pemerintah daerah bekerja secara maksimal untuk mengembangkan potensi di daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan terhindar dari *financial distress*. Banyaknya jumlah penduduk menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai potensi dan kualitas sumber daya yang baik untuk menunjang kinerja, sehingga kemungkinan untuk mengalami *financial distress* rendah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*, derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, posisi keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, efisiensi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, dan kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap *financial distress*.

Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu dapat mempertimbangkan penggunaan metode pengukuran kategori pemerintah daerah dalam kondisi *financial distress* dan *non-financial distress* selain DSCR, peneliti dapat memperluas sampel yang akan digunakan, tidak hanya terbatas pada satu provinsi namun juga dapat menggunakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan pemerintah daerah diharapkan untuk menyampaikan informasi publik secara trasnparan dan berkala, selain untuk mendukung para peneliti juga sebagai sarana untuk memperoleh informasi kredibel yang dapat digunakan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan.

DAFTAR REFERENSI

- Almilia, L. S. (2006). Prediksi Kondisi *Financial distress* Perusahaan Go-Publik dengan Menggunakan Analisis Multinomial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 1–26.
- Dewi., L. K. C., & Utama, I. G. B. R. (2022). Pemasaran Kreatif Untuk Segala Bisnis. Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Pemasaran_Kreatif_Untuk_Segala_Bisnis/-v1wEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. November 2017. Ringkasan APBD 2018.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). *Explanators of local government distress*. *Abacus*, 43(3), 396–418. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x>
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah>

- dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018. Pinjaman Daerah. 21 Desember 2018. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah. 24 Maret 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143371/permendagri-no-19-tahun-2020>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Sejarah, 5(9), 79–83. <http://jurnal.unTAG-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>
- Sari, D. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value For Money pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Simanjuntak, B. A. (2013). Dampak otonomi daerah di Indonesia merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Dampak_otonomi_daerah_di_Indonesia/NjgUDAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Sutaryo, Bambang Sutopo, D. S. (2010). Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait *Financial distress* Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010, 1–31.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(1), 12–21.
- Syurmita. (2014). Prediksi *Financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Lombok, Universitas Mataram.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5 Januari 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=224>